

BAB II

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN REMBANG : SEJARAH DAN PLATFORM

Bab ini membahas tentang sejarah Partai Persatuan Pembangunan dan platform Partai Persatuan Pembangunan. Pada bagian pertama mengenai sejarah, penulis akan menjelaskan tentang sejarah singkat terbentuknya PPP sejak awal partai ini berdiri hingga sekarang beserta alasan-alasan dari PPP yang memproklamkan dirinya sebagai Rumah Besar Umat Islam. Keikutsertaan PPP dalam pemilu dan siapa saja Ketua Umum PPP yang pernah memimpin PPP menjadi gambaran sejarah perjuangan bagi PPP. Perjuangan PPP sebagai satu-satunya fasilitas memperjuangkan aspirasi umat Islam dan menjaga kondisi negeri tetap berada dalam jalur norma-norma keagamaan dan peradaban, PPP menjadi partai yang kritis terhadap program-program pemerintah yang bertentangan dengan norma keagamaan. Selain itu, sebagai partai cukup lama berada di negeri ini, tentu terdapat konflik-konflik yang menjadi lika-liku perjalanan PPP. Konflik yang terjadi bisa berasal dari pemerintah Orde Baru dengan sikap otoriternya atau berasal dari internal partai itu sendiri karena pluralisme yang dimiliki PPP.

Pada bagian kedua mengenai Islam sebagai platform PPP, menjelaskan tentang ajaran *Ahlusunnah wal jama'ah* yang menjadi dasar pergerakan umat Islam di Indonesia khususnya PPP. Ajaran ini pula yang menjadi gambaran ideologi umat Islam di Indonesia sejak pertama Islam masuk hingga sekarang. *Ahlusunnah wal jama'ah* menjadi bukti bahwa apapun bentuk organisasi keagamaan yang diikuti, *ahlusunnah wal jama'ah* tetap menjadi ajaran yang dianut oleh sebagian besar organisasi Islam di Indonesia pada saat itu. Partai

berbasis massa dan juga kader ini menjadikan massa dan kadernya sebagai kekuatan untuk mempertahankan keberadaan partai meski melalui berbagai macam konflik perpecahan. Kekuatan massa dan kader yang dimiliki tercermin pada PPP di kabupaten Rembang. Hal ini disebabkan karena di beberapa wilayah Rembang, PPP berkuasa penuh karena keberadaan *local strongman* PPP di wilayah tersebut. Wilayah nama saja yang menjadi kekuasaan *local strongmen* tersebut akan di jelaskan pada bagian akhir bab ini.

2.1. Sejarah dan Visi Misi Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan disingkat dengan PPP didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan 30 Dzulqa'dah 1392 H. Partai yang berasaskan Islam dan bercirikan *Ahlussunnah Wal Jama'ah* ini berdiri sebagai hasil fusi dari empat partai politik islam yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai fraksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai Rumah Besar Umat Islam. Partai ini didirikan oleh lima deklaratator yang juga merupakan empat pemimpin partai Islam peserta pemilu pada tahun 1971 dan satu orang pemimpin dari kelompok Persatuan Pembangunan. Kelima tokoh tersebut yaitu KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama; H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII; Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

Penjelasan sejarah PPP dalam hasil Ketetapan Muktamar PPP ke VIII dijelaskan bahwasannya PPP merupakan partai politik penerus estafet empat partai Islam dan wadah penyelamat aspirasi umat Islam, serta sebagai cermin kesadaran dan tanggungjawab tokoh-tokoh umat Islam dan Pemimpin Partai untuk bersatu, bahu meKiaiu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT melalui perjuangan politik. Secara historis, PPP merupakan wujud kelanjutan dari politik umat Islam dimasa pergerakan nasional dan masa kemerdekaan sejak terbentuknya organisasi umat Islam seperti Syarikat Dagang Islam (1905) yang kemudian menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) tahun 1923, Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) tahun 1928, MIAI (Majelis Islma A'la Indonesia) yang kemudian menjadi Masyumi (1945) untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jati diri PPP adalah sebagai partai politik Islam yang berwawasan ke-Indonesiaan, berorientasi keumatan dan berakhlakul karimah, dalam mewujudkan negara dan bangsa Indoneisa yang adil, makmur, sejahtera lahir dan bathin yang di ridhoi Allah SWT dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Masruhan Samsurie Ketua DPW PPP Jawa Tengah⁶ berpendapat bahwa seiring dengan perkembangan peristiwa yang terjadi saat itu, organisasi Islam tersebut beberapa ada yang bubar dan alih-alih membentuk organisasi atau partai baru dengan nama berbeda. Pada masa penjajahan Jepang MIAI dibubarkan karena di anggap mengganggu pemerintah Jepang kemudian Jepang membentuk Masyumi sebagai gantinya. Dan Masyumi resmi menjadi partai politik dan

⁶ Hasil wawancara dengan Masruhan Samsurie di Semarang

sebagai satu-satunya wadah politik Islam pada masa itu, sehingga seluruh ormas Islam tergabung di dalamnya. Namun, karena ada beberapa gejolak politik di internal Masyumi yang mana ada kelompok yang menginginkan pendirian negara Islam pada saat perumusan dasar negara, NU dan Perti keluar dari Masyumi dan membentuk partai baru, yaitu Partai NU dan Perti. Kemudian Masyumi di bubarkan oleh Soekarno. Alih-alih dibubarkan Masyumi membentuk partai baru sebagai gantinya yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dan PSII menjadi partai sendiri. Sehingga pada saat itu ada banyak partai Islam yang berdiri di Indonesia. Setelah lengsernya Soekarno dan beralih ke pemerintahan Orde Baru oleh Presiden Soeharto, seluruh partai yang ada di Indonesia difusikan dalam satu partai. Partai Islam dengan basis religius-materialis yang difusikan dalam satu partai bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bukan hanya partai Islam, tetapi partai berbasis nasionalis-sosialis seperti PKI, PNI, dsb di fusikan dalam partai PDI yang sekarang menjadi PDIP. Sehingga dengan kata lain PPP yang di bentuk oleh pemerintahan orde baru tersebut tercermin seperti Masyumi pada pemerintahan orde lama melihat dari penggabungan dari partai-partai tersebut. Alih-alih memiliki seluruh partai tersebut memiliki nama baru, namun isi dari PPP tidak berbeda dengan Masyumi pada saat itu. Hal ini di karenakan partai yang di fusikan kedalam PPP merupakan pecahan dari Masyumi pada tahun 1945. Oleh karena itulah, PPP memproklamirkan dirinya sebagai Rumah Besar Umat Islam karena seluruh komponen partai Islam ada di dalam PPP.

PPP memang Rumah Besar Umat Islam karena pada saat itu seluruh fasilitas untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam ada di PPP. Tetapi jika kita membaca Deklarasi Hasil Rapat Presidium Badan Pekerja dan Pimpinan Fraksi Kelompok

PPP yang dibuat pada 5 Januari 1973 di Jakarta, PPP sebagai partai politik hanyalah alat politik saja yang mana seluruh partai yang di fusikan hanya akan memainkan politiknya di dalam PPP. Hal ini tidak berlaku bagi kegiatan diluar kegiatan politik seperti kesejahteraan sosial, kegiatan kebudayaan, kegiatan keagamaan, dsb di kerjakan oleh organisasi sebagaimana sediakala, bahkan lebih ditingkakan sesuai dengan partisipasi kita dalam pembangunan spiritual/material.

Dalam deklarasi itu berbunyi :

“Keempat Partai Islam : NU, PARMUSI, PSII dan PERTI yang sampai sekarang ini tergabung dalam bentuk konfederasi kelompok Partai Persatuan Pembangunan, dalam Rapat Presidium Badan Pekerja dan Pimpinan Fraksi tanggal 5 Januari 1973, telah seia sekata untuk memfusikan politiknya dalam satu partai politik bernama Partai persatuan Pembangunan.

Segala kegiatan yang bukan kegiatan politik, tetap dikerjakan organisasi masing-masing sebagaimana sediakala, bahkan lebih ditingkatkan sesuai dengan partisipasi kita dalam pembangunan spiritual/materiil.

Untuk merealisasi kegiatan ini telah di bentuk team untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan Partai Persatuan pembangunan baik organisatoris maupun politis. “

Maka dari itu, anatomi sosial budaya PPP tentunya dapat beragam sesuai dengan asal muasal organisasi tersebut berasal. Meskipun dalam politik, organisasi tersebut dipaksa untuk satu suara dan satu golongan (partai) di PPP, tetapi secara sosiologis dan antropologisnya mereka berbeda dan berjalan masing-masing sesuai dengan kebudayaan dan kepercayaan yang dianut. Oleh karena itu, karena adat dan kebudayaan yang berbeda namun disatukan tidak menuntut kemungkinan banyak terjadi konflik internal dalam menjalankan politik partai. Hal ini di sebabkan arah gerak politik juga tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan yang

dianut oleh politisinya. Disisi lain, PPP juga mendapatkan banyak tekanan dari luar (pemerintah dan masyarakat) serta pluralism PPP itu sendiri. Hal ini terjadi mulai dari tekanan ideologis, suara pemilih, perpecahan partai dan konflik internal.

Partai Persatuan Pembangunan sempat mengalami tekanan ideologi politik pada masa orde baru. Partai yang berdiri berasaskan Islam dan lambang Ka'bah ini sempat meninggalkan asas Islamnya dan mengganti lambangnya berupa bintang dalam segi lima. Hal ini di sebabkan karena sistem politik dan peraturan yang berlaku pada tahun 1984 yaitu partai politik yang berasaskan Pancasila. Ketika masa orde baru runtuh dan masuk pada masa reformasi dengan Presiden Bapak BJ Habibie, PPP mulai menggunakan kembali asas Islamnya dan menggunakan lambang Ka'bah. Meski demikian PPP tetap menjadi partai yang bersifat nasional dan berkomitmen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini juga menjadi salah satu tujuan PPP yang mana diperkuat dalam Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan dalam Muktamar ke VIII, bunyinya : "Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahteralahir-batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala".

Sejarahnya PPP telah mengikuti pemilu sejak tahun 1977 hingga saat pemilu dipercepat tahun 1999 dan memiliki hasil yang fluktuatif. Perolehan suara yang berhasil di capai partai PPP pada tahun 1977 yaitu 18.745.565 suara (29,29 %) atau 99 kursi dari 360 kursi yang diperebutkan. Pada tahun 1982, PPP mengalami kenaikan suara 20.871.800 suara (27,78%) atau 94 kursi dari 364 kursi yang di

perebutkan. Kemudian pada tahun 1987, PPP mengalami penurunan perolehan suara yaitu 13.701.428 suara (15,97%) meraih 61 kursi dari 400 kursi yang diperebutkan. Pada Pemilu 1992 PPP meraih 16.624.647 suara (14,59%) dan meraih 62 kursi dari 400 kursi yang diperebutkan. Di tahun 1997 PPP meraih 25.340.018 suara dan meraih 89 kursi dari 425 kursi yang diperebutkan. Pada Pemilu 1999 PPP meraih 11.329.905 suara dan meraih 58 kursi dari 462 kursi yang diperebutkan. Pemilu 2004 PPP meraih 9.248.764 dan tetap meraih 58 kursi dari 550 kursi yang diperebutkan. Pada Pemilu 2009 PPP meraih 5,5 juta suara dan PPP memperoleh 38 kursi dari 550 kursi yang diperebutkan. Meskipun perolehan suara fluktuatif akan PPP terus mengalami penurunan suara dan jumlah kursi di DPR. Pada saat-saat seperti ini menandakan bahwa PPP mulai tersingkir dengan datangnya partai-partai Nasionalis baru. Pada pemilu tahun 2014 PPP memperoleh 8.157.488 suara (6,53%) dan meraih 39 kursi dari 560 kursi yang diperebutkan.

PPP dalam perjalanan politiknya telah melalui Muktamar yang ke VIII dengan Ketua Umum DPP PPP yang pertama adalah H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH yang menjabat sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai tahun 1978. Selain jabatan Ketua Umum pada awal berdirinya PPP juga mengenal presidium partai yang terdiri dari KH.Idham Chalid sebagai Presiden Partai, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Drs.H.Th.M.Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masykur, masing-masing sebagai Wakil Presiden. Ketua Umum DPP PPP yang kedua adalah H. Jailani Naro, SH. Dia menjabat dua periode. Pertama tahun 1978 ketika H.Mohammad Syafaat Mintaredja mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun 1984. Dalam Muktamar I itu Naro terpilih lagi menjadi

Ketua Umum DPP PPP. Ketua Umum DPP PPP yang ketiga adalah H. Ismail Hasan Metareum, SH, yang menjabat sejak terpilih dalam Muktamar II PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar III tahun 1994. Ketua Umum DPP PPP yang keempat adalah H. Hamzah Haz yang terpilih dalam Muktamar IV tahun 1998 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar V tahun 2003. Hasil Muktamar V tahun 2003 juga menetapkan jabatan Wakil Ketua Umum Pimpinan Harian Pusat DPP PPP, yang dipercayakan muktamar kepada mantan Sekjen DPP PPP, H. Alimawarwan Hanan, SH. Ketua Umum DPP PPP yang kelima adalah H. Suryadharma Ali yang terpilih dalam Muktamar VI tahun 2007 dengan Sekretaris Jenderal H. Irgan Chairul Mahfiz sedangkan Wakil Ketua Umum dipercayakan oleh muktamar kepada Drs. HA. Chozin Chumaidy. H. Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali menjadi Ketua Umum untuk Masa Bakti 2011-2015 melalui Muktamar VII PPP 2011 di Bandung. Ketua Umum PPP yang keenam yaitu Romahurmuzyi yang terpilih dalam hasil Muktamar VIII di Pondok Gede Jakarta. Ia memimpin pada periode 2016-2021 dan didampingi oleh Wakil Ketua Umum yaitu Mardiono, Fadli Nurzal, Amir Uskara, Arwani Thomafi, Fernita Darwis, Wardatul Asriah, Reni Marlinawati, Tamam Achda, Anita Prihapsari, Ermalena Muslim, Mansyur Kardi. Sekretaris Jendral PPP dipercayakan kepada Asrul Sani.

Wakil Ketua Umum DPP PPP 2011-2015, Lukman Hakim Saifuddin, berpendapat sebagaimana dijelaskan dalam Rapat Pleno DPP PPP 2011-2015, 21-22 Oktober 2011 di Jakarta, PPP memproklamkan sebagai Rumah Besar Umat Islam, demi memperoleh kembali kejayaan yang pernah dimiliki. Menurutnya ada tiga alasan yang menjelaskan pengertian tersebut. Pertama, PPP merupakan

tempat kembalinya orang Islam, terutama untuk menyalurkan aspirasi dan menindaklanjutinya. Sebagaimana kita maklumi, di era reformasi banyak eksponen PPP yang pindah ke partai lain atau mendirikan partai baru. Selain itu, banyak organisasi Islam yang merupakan pendiri atau pendukung PPP yang memberikan dukungan kepada partai politik baru. Namun, di rumah baru itu banyak eksponen PPP yang mengalami kekecewaan. Nah, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi mereka yang telah meninggalkan PPP untuk kembali lagi berjuang bersama PPP dalam menyalurkan aspirasi umat Islam serta menindaklanjutinya. Kedua, PPP merupakan tempat bernaung atau berlindung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana kita maklumi, PPP merupakan partai yang paling gigih memperjuangkan aspirasi umat Islam dari berbagai macam langkah-langkah berbagai kalangan yang merugikan umat Islam di Indonesia. Hal ini dilakukan sejak PPP berdiri sampai kini. Sebagai kompensasi atas berdirinya PPP sebagai partai Islam, maka PPP meredam keinginan sebagian umat Islam itu sendiri untuk mendirikan negara Islam atau mengganti Pancasila dengan asas Islam, karena ternyata dalam negara Pancasila masih dimungkinkan berdirinya partai Islam yang mempunyai kebebasan memperjuangkan aspirasi umat Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan PPP dalam konteks NKRI sangat penting. Ketiga, PPP merupakan tempat untuk menyatukan aspirasi umat Islam dan menindaklanjutinya, sehingga aspirasi umat Islam dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partai yang sudah berdiri hampir mencapai setengah abad ini, tentu saja memiliki visi dan misi partai yang menjadi landasan PPP tetap bertahan. Visi PPP

yang tertuang di dalam Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 08/TAP/MUKTAMAR VIII/PPP/2016 yaitu:

“Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hokum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman.”

Dalam visi tersebut terdapat tujuan PPP dalam berbagai bidang seperti agama, politik, budaya, hukum, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan politik luar negeri. Tujuan-tujuan tersebut yang akan menjadi langkah PPP untuk mempertahankan posisinya.

Platform PPP dalam bidang agama menjelaskan tentang perlunya penataan kehidupan masyarakat yang islami dan berakhlaqul karimah dengan prinsip amar *ma'ruf nahi munkar*. Visi ini tentu saja sangat erat kaitannya dengan islam sebagai platform PPP yang akan penulis jelaskan pada sub bab berikutnya. Bukan saja tentang *akhlaqul karimah* tetapi juga mengenai pentingnya peran agama sebagai moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan bernegara. Visi tersebut juga mencakup hubungan yang terjalin antara agama dan negara adalah saling membutuhkan, memelihara, sinergis dan simbiotik dan berpegang pada universalitas islam dan lokalitas keindonesiaan. Keagamaan yang diusung dalam PPP juga berkomitmen pada sikap toleransi dan plurarisme pemikiran keagamaan dan kerukunan antar umat beragama.

Pada bidang politik PPP berkomitmen untuk menciptakan kualitas demokrasi di Indonesia. Kualitas demokrasi ini tercermin dalam kelembagaan politik, pranata sosial kehidupan politik, pendidikan politik di lingkungan partai, menjunjung tinggi HAM, menjunjung kebebasan berekspresi, berpendapat dan

berorganisasi, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. PPP tentunya juga berupaya memperthankan kedaulatan NKRI yang berasakan Pancasila dan UUD 1945 dengan semangat Bhineka Tunggal Ika. PPP merupakan wadah pergerakan politik bagi golongan umat Islam. Meskipun terbentuk dari fusi 4 partai, tetapi dengan dijadikan satu partai islam di Indonesia, maka umat Islam seperti memiliki satu partai yang bergerak pada keislaman pada masa itu.

Platform PPP dalam bidang budaya berupaya untuk menciptakan kehidupan yang religius dan bermoral, toleran serta menjunjung tinggi persatuan dan kebersamaan. Budaya demokratis yang dijunjung akan menumbuhkan daya kritis dan kreatif jika mampu menciptakan budaya demokrasi yang partisipasif. Tentunya hal ini juga akan memperkokoh budaya local dan mencegah globalisasi informasi yang bertentangan dengan nilai agama dan budaya bangsa.

Bidang hukum dalam platform PPP berupaya menegakkan supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum, dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, terciptanya tertib sipil dan rasa aman diantara warga, penguatan institusi dan intrumen penegak hukum serta penguatan moralitas penegak hukum. PPP juga mengupayakan pembaruan sistem hukum nasional.

Di bidang kesejahteraan sosial, PPP berupaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan dan kesehatan yang berkualitas. Program pembangunan kesejahteraan ini diarahkan pada peningkatan sarana pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata. Terkhusus dalam bidang pendidikan juga masih sejalan dengan kesejahteraan sosial, PPP berupaya pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pada program kesejahteraan.

Hal ini di harapkan mampu menciptakan manusia yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Dalam bidang politik luar negeri, PPP berupaya untuk mengembangkan politik luar negeri yang ikut aktif menciptakan perdamaian dunia, menolak segala bentuk penjajahan dan menolak segala bentuk ketergantungan dari pihak luar yang mampu mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia. PPP juga berupaya untuk Indonesia menciptakan persahabatan dengan negara lain sebagai bentuk saling menghormati, dan kerjasama untuk menciptakan perdamaian dunia yang adil dan beradab.

Dalam mewujudkan cita-cita tersebut PPP memiliki misi perjuangan yang tercermin dalam lima khidmat perjuangan PPP tertuang dalam buku saku kader PPP berjudul “Lima Khidmat dan Enam Prinsip Perjuangan PPP” (Kurniawan,2016:7) yaitu:

1. PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheism, komunisme, marxisme, leninisme serta sekulerisme, liberalism dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.
2. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam dengan mengembangkan *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan sesama manusia).

Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, dikriminasi dan budaya kekerasan.

3. PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, memepertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan *ukhuwah wathoniyah* (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang para disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial meKiaiyakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
4. PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkana kehiduoan politikraknya yang mencerinkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni serta kesewenang-wenangan yang mendzolimi rakyat.
5. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur yang di ridhai Allah SWT, *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

2.2. Islam sebagai Platform Partai Persatuan Pembangunan

Islam bagi PPP merupakan syari'at terakhir yang di turunkan Allah SWT kepada umat manusia di muka bumi adalah suatu kebenaran yang mutlak. Islam sebagai agama yang mengandung nilai kebenaran absolut karena di turunkan langsung oleh Allah SWT untuk memuliakan derajat umat manusia yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan-Nya yang lain. Islam sebagai ad-dien merupakan seluruh perintah dan larangan yang mengandung tuntunan kebijakan untuk menebarkan kasih sayang dan kedamaian *rahmatan lil 'alamin*.

PPP memandang bahwa pemahaman agama Islam oleh mayoritas umat Islam di Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia adalah paham *ahlu sunnah wal jamma'ah* dalam arti luas, yaitu suatu paham keagamaan yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat bersalaf Sholeh. Paham keagamaan *ahlu sunnah wal jamma'ah* menjunjung nilai-nilai moderasi (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*), menjaga keseimbangan (*tawazun*), dan menebarkan nilai kasih sayang untuk alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*). Paham keagamaan *ahlu sunnah wal jamma'ah* ini menolak segala bebtuk ajaran ekstrimisme, anarkis, radikalisme dan budaya kekerasan lainnya.

Islam sebagai ideologi PPP dimasukdkan bahwa seluruh pemikiran, sikap seluruh kader dan anggota juga seluruh kebijakan partai PPP bersandarkan pada nilai dan ajaran agama Islam. Untuk itu, guna mencapai visi misi yang dimiliki PPP, seluruh kader partai perlu untuk terus dilakukan penanaman dan internalisasi nilai-nilai ideologi tersebut agar PPP mampu mencapai tujuan politiknya sesuai dengan visi, misi dan nilai yang dimiliki partai. Internalisasi nilai-nilai ideologi partai tersebut harus bisa menjadi corak, identitas atau kekhas-an dari partai PPP

itu sendiri yang melambangkan keluruhan dari ajaran Islam. Dan PPP sendiri juga perlu menyadari betapa besar tanggung jawab yang diemban sebagai partai yang berideologi Islam untuk menjaga marwah dan martabat agama Islam.

Berdasarkan penjelasan dari situs resmi Partai Persatuan Pembangunan, partai ini memiliki beberapa platform. Pertama di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang (1) perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlaqul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar, (2) pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan, (3) paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan, dan (4) komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama. Kedua di bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlaqul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya good and clean government, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, platform di bidang ekonomi, PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha

keluarga/individual, usaha swasta, badan usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Jika menelisik dalam sejarah, di masa lalu PPP sempat merubah lambang dan ideologi partai menjadi bintang dan Pancasila sebagai ideologinya akibat dari penindasan masa orde baru. Kemudian, ketika orde baru sudah tumbang, PPP kembali kepada komitmen awal yang kembali pada khittahnya sebagai partai Islam dengan lambang Ka'bah. Hal ini menunjukkan adanya penegasan kembali bahwa PPP berupaya untuk mewujudkan masyarakat madani yang religius. Paradigma Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi alam semesta) dengan mengutamakan demokrasi, kebenaran, keadilan, toleransi, persamaan hak, persaudaraan, saling pengertian dan kerjasama menjadi komitmen yang dipegang oleh PPP. Bukan hanya itu, tetapi menghormati plurarisme dan kebhinekaan bangsa sebagai kekayaan budaya dan sumber perekat kekuatan, bukan sumber disintegrasi.

2.3. PPP di Kabupaten Rembang

2.3.1. Sejarah PPP di Rembang

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memulai kepengurusan pertamanya di tahun 1973. Kepengurusan yang dibentuk sesuai dengan aturan kepengurusan partai di Indonesia yaitu dengan membentuk Dewan Pimpinan Pusat untuk kepengurusan di tingkat pusat, Dewan Pimpinan Wilayah untuk di daerah provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang untuk kepengurusan di tingkat kabupaten atau kota. Jika di hitung awal tahun terbentuk hingga sekarang dengan jumlah satu periode 5 tahun maka PPP telah memiliki sejarah kepengurusan sebanyak kurang lebih 9 periode. Selama menguasai daerah Rembang, ternyata PPP memiliki daerah-

daerah tertentu yang menjadi wilayah kekuasaannya dan tentu cukup sulit untuk di masuki oleh partai lain. Daerah tersebut yaitu Leteh, Sarang dan Lasem. Ketiga daerah tersebut menjadi dominasi PPP karena memiliki kiai kharismatik pendiri pondok pesantren yang berpengaruh secara politis dengan PPP di wilayah tersebut.

Daerah Leteh merupakan wilayah di bawah pengaruh KH Bisri Mustofa dan keluarganya. Ia seorang pendiri pondok pesantren Raudlatut Thalibin yang cukup terkenal di wilayah Leteh dan sekitarnya. Afiliasi politis yang dijalin dengan PPP, bermula dari anaknya KH Cholil Bisri yang bergabung ke PPP karena fusi partai NU kedalam PPP. Di PPP, pada awal kepengurusannya terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Rembang. Pengaruh yang di bangun oleh keluarga ini tidak serta merta secara politik praktis semata. Namun, berdasarkan pengajian-pengajian yang dilakukan oleh ayahnya KH Bisri Mustofa, KH. Cholil Bisri sendiri, adiknya Mustofa Bisri –seorang kiai dan budayawan yang sangat terkenal di Indonesia, biasa di panggil Gus Mus – dan hingga saat ini dilakukan oleh anak-anaknya seperti Gus Yahya Staquf. Gus Cholil Bisri memimpin DPC PPP Rembang sejak tahun 1973 –pertama kali PPP dibentuk – hingga 1990. Selama 17 tahun dirinya memimpin tentunya dapat mempengaruhi elektabilitasnya sebagai seorang politisi dan kiai di wilayah kekuasaannya tersebut.

Pengaruh yang di berikan keluarga ini sangat besar di wilayah Leteh dan sekitarnya di buktikan pada saat PPP terpecah karena fusi partai NU di dalamnya memisahkan diri dan membentuk partai baru yaitu PKB. Hal ini terjadi pada tahun 1998. KH Cholil Bisri di desak untuk bergabung dengan PKB setelah mengikuti

acara istighozah di Jawa Timur tepatnya pada tanggal 30 Mei 1998. Ia menjadi salah satu tokoh yang memiliki kiprah besar dalam pembentukan partai baru saat itu dengan menjadi Ketua Lajnah Sebelas Rembang dan anggotanya PWNU Jawa Barat.⁷ Kiprah besarnya dibuktikan ketika dirinya menjadi pengusul terlengkap mengenai partai melalui Lajnah Sebelas Rembang dan rumahnya menjadi tempat pertemuan para kiai NU yang ingin berinisiatif membentuk Partai Kebangkitan Bangsa. Setelah terbentuknya PKB, Kiai Cholil mendapatkan amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB dengan KH Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuronya. Pindahannya KH Cholil Bisri ke PKB membuat seluruh wilayah Leteh dan Rembang kota beralih afiliasi politiknya menjadi PKB dan tentunya wilayah tersebut di kuasai pula oleh PKB. Seluruh lapisan masyarakat yang menjadi jama'ah keluarga Kiai Cholil beralih memilih PKB. Hal ini akhirnya menyebabkan wilayah Rembang terpecah menjadi dua yaitu Leteh Rembang dengan Sarang dan sekitarnya.

Wilayah kedua yang menjadi wilayah kekuasaan PPP di Rembang yaitu Sarang. Wilayah ini menjadi tempat tinggal dan pondok pesantren dengan kiai yang paling fenomenal yaitu KH Maimoen Zubair. Ia merupakan seorang kiai dan juga politisi yang tentunya pengaruhnya tidak perlu di ragukan lagi karna bukan hanya di Rembang tetapi juga nasional. Kiai Maimoen merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Anwar Sarang dan menjadi Ketua Majelis Syariah –dewan penasihat partai— Partai Persatuan Pembangunan. Pengaruhnya tentu tidak hanya mengantarkan Kiai Maimoen sebagai dewan penasihat saja namun juga kepada pergerakan politik anak-anaknya. Setelah lepasnya pengaruh dari keluarga Cholil

⁷ pkb.id

Bisri, keluarga KH Maimoen-lah yang memimpin DPC Rembang. Kepemimpinannya di gantikan oleh putra sulung KH Maimoen yaitu KH Abdullah Ubab. Kiai Ubab memimpin pada tahun 1999 hingga 2005. Selain Gus Ubab, ada Gus Kamil yang juga menjadi Ketua DPC dari tahun 2009 hingga sekarang.

KH. Maimoen Zubair selain seorang yang memiliki pondok pesantren, semasa mudanya ia pernah menjabat sebagai anggota dewan DPRD Rembang. Tentunya kemampuan untuk menarik massa tidak di ragukan lagi, karena dirinya seorang kiai yang memang sudah memiliki massa dan dan politisi yang mampu mengelola massa tersebut. Tidak heran dengan kemampuan politisnya mampu mempengaruhi banyak orang hingga orang-orang sehingga menjadi tokoh yang paling berpengaruh di PPP. Ia menjadi salah satu sosok yang membesarkan PPP. Kesetiannya pada PPP bukan hanya di tunjukkan melalui penolakannya untuk masuk ke PKB⁸ tetapi juga dengan semakin banyaknya santri-santri yang masuk ke PPP, hal ini membuktikan bahwa Kiai Maimoen juga mensyiarkan PPP kepada para santri dan masyarakat di sekitarnya.

Wilayah kekuasaan PPP selanjutnya ada di Lasem Rembang. Di wilayah ini juga memiliki seorang tokoh politisi dan kiai yang sangat fenomenal yaitu KH Achmad Thoyfoer. Ia di kenal karena kepiawaiannya saat menjadi anggota dewan. Bagi orang PPP, KH Thoyfoer merupakan salah satu contoh politisi yang paling santun dan cerdas. Oleh karenanya, PPP juga sangat bergantung kepada KH Thoyfoer dan menurun hingga ke anak-anaknya. Putra putri kiai yang terjun ke politik diantaranya ada Gus Arwani atau yang biasa dikenal dengan Gus Aang dan

⁸ Hasil wawancara dengan Farid Masduqi.

Gus Aziz, kemudian anak perempuan yang terakhir yang akan merintis ke jalur politik yaitu Nadia Fathimah Thomafi dengan menjadi salah satu caleg DPR RI 2019. Selain itu, anak perempuan lainnya juga menjadi salah satu ketua WPP PPP Rembang. Ia adalah Ning Jannah istri dari Gus Azis.

Jika kita bahas secara struktural, urutan kepengurusan PPP Rembang dari tahun ke tahun tentunya di mulai dari KH Cholil Bisri pada tahun 1973-1990. Setelah selesai tahun kepemimpinan KH. Cholil Bisri, roda organisasi DPC PPP Rembang dipimpin oleh KH. Hazim Maburur pada tahun 1990 sampai 1999. Ia memimpin selama dua periode. Pada tahun 1999 hingga 2005, posisi ketua digantikan oleh KH. Ubab Maemoen. ia adalah putra pertama KH Maemoen Zubair, seorang kiai dan politisi yang sangat terkenal di Rembang. Pada periode berikutnya, DPC PPP Rembang dipimpin oleh menantu seorang kiai yang sangat terkenal pula di Rembang yaitu H. Abdul Azis. Ia merupakan menantu dari seorang kiai dan politisi yang terkenal yaitu KH. Achmad Thoyfoer. Gus Azis, begitu sapaannya memimpin DPC PPP Rembang pada tahun 2005-2009. Saat ini dirinya juga sedang menjabat sebagai anggota dewan DPRD Jawa Tengah dan menjadi Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan. Tahun 2009 hingga sekarang, DPC PPP Rembang kembali dipimpin oleh keturunan KH Maemoen Zubair. Ia adalah KH Majid Kamil. Gus Kamil menjadi Ketua DPC PPP Rembang dua periode, yang pertama tahun 2009-2016 dan terpilih kembali pada Mukhtar VIII tahun 2016 untuk kepengurusan PPP Rembang periode 2016-2021. Selain sebagai Ketua DPC Rembang, Gus Kamil juga berkiprah di ranah politik struktural dengan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Rembang dari PPP.

Abdul Azis atau Gus Azis sebelum dirinya menjadi Ketua DPC PPP Rembang, ia sempat menjadi Sekretaris DPC Rembang masa KH Ubab Maimoen. Kemudian setelah selesai masa jabatan Gus Ubab, Gus Aziz menggantikan Gus Ubab menjadi Ketua DPC dan Sekretaris DPCnya adalah Gus Kamil. Pola yang sama juga terjadi di masa Gus Azis setelah meninggalkan DPC dan menjadi pengurus DPW, sekretarisnya Gus Kamil-lah yang menggantikannya menjadi Ketua DPC Rembang hingga saat ini telah memimpin dua periode. Pada kepengurusan sekarang, sekretaris DPC PPP Rembang adalah Samsul Huda. Ia merupakan seorang ajudan dari Bupati Rembang periode 2014-2018 H. Abdul Hafidz S.Pd.

2.3.2. Dua Kutub Ulama Rembang dan Sarang

Perpecahan NU di dalam PPP menjadi partai PKB tentunya memberikan dampak yang besar bagi berlangsungnya perpolitikan PPP. Berdasarkan sejarah yang terjadi dengan munculnya tiga wilayah kekuasaan dan terpecah dengan munculnya PKB, membuat PPP terbelah menjadi dua kubu. Kubu yang pertama yaitu kubu yang mengikuti suara NU untuk membentuk PKB, kubu dari KH. Cholil Bisri di Rembang kota dan kedua dari kubu KH. Maimoen Zubair di Sarang dan KH. Achmad Thoyfoer di Lasem yang memilih untuk bertahan di PPP. Perpecahan menjadi dua kubu ini tentu mempengaruhi perjalanan politik PPP di Rembang. Suara PPP yang berasal dari KH. Cholil Bisri secara otomatis berpindah ke PKB. Para kiai yang mengikuti jejak KH. Cholil Bisri juga ikut berpindah sehingga menjadi pondasi kekuatan suara bagi PKB di Rembang. Hal ini berdampak pada penurunan suara PPP di Rembang yang terus terjadi setiap tahunnya.

Perpecahan tersebut menciptakan dampak yang besar bagi masyarakat Rembang. Hal ini disebabkan karena Rembang menjadi tempat pertama kali gagasan membentuk partai baru itu muncul. Sehingga pengikut setia NU yang berfikir bahwa NU perlu mendirikan partai baru untuk memperkuat NU sendiri secara sadar langsung berpindah ke PKB. Tetapi, bagi mereka yang lebih mengikuti *dawuh* Kiai Maimoen Zubair dan KH. Achmad Thoyfoer akan tetap bertahan membesarkan PPP. Perpecahan menjadi sedikit panas ketika PKB berfikir bahwa PPP akan mati, dan tidak memiliki suaranya lagi. PPP dianggap sebagai partai kuno, tradisional, tua dan *loyo*. Tetapi ternyata mereka salah, pada pemilu tahun 2004, PPP tetap unggul dengan memiliki suara terbesar ke tiga di nasional. Prestasi ini membuktikan bahwa PPP mampu bertahan dan tidak akan hilang.

Seiring berjalannya waktu, perolehan suara terbesar ketiga nasional ternyata tidak membuat PPP bisa terus mempertahankan posisinya dan tentunya semakin kekurangan kader terutama dari basis NU. Hal ini di karenakan setiap waktunya PKB juga terus mengembangkan sayapnya, struktural PB NU di Indonesia juga di kuasai oleh PKB. Kader-kader NU lebih dekat dengan PKB dibanding PPP dan memilih untuk bergabung menjadi kader atau simpatisan PKB. Padahal pergerakan NU bukan hanya di dalam struktural masyarakat desa tetapi juga meraKiai ke akademik di kampus-kampus melalui organisasi PMII, KMNU, dll. Tentunya hal ini dapat menjadi salah satu kekuaan NU untuk meraih simpatian dari kalangan muda yang mampu melanjutkan kaderisasi baik di NU maupun di partai politik.

Simpati dari kalangan muda untuk masuk ke partai terjadi pula di Rembang, dengan basis kota santri tersebut para santri masif bergerak di bidang politik karena mendapatkan arahan langsung dari pondok mereka belajar atau hatinya ikut tergerak oleh sang kiai yang terjun kedalam politik. Para Kiai dan keturunannya juga memperluas jaringan santri dengan menjalin koalisi dengan kiai lain diberbagai pondok atau membuka pondok baru yang diasuh langsung oleh kerabat mereka. Hal itu berdampak untuk mempertahankan suara dan wilayah kekuasaannya. Meskipun diawal pembangunannya tidak semata-mata untuk membangun kekuasaan tetapi untuk memperluas sayap pendidikan pondok pesantren dan untuk menaKiai santri-santri pondok, namun hal tersebut tidak menafikkan bahwa dampak dari perluasan tersebut sangat berguna untuk membangun kekuatan politik.

Pondok pesantren yang menjadi kekuatan politik bagi PKB Rembang ada di Pondok Rauthotut Thalibin milik Bisri Mustofa yang saat ini diasuh langsung oleh anaknya Mustofa Bisri, seorang kiai dan budayawan yang sangat terkenal. Pondok Routhotut Thalibin memiliki dua cabang, yaitu pondok Taman Pelajar Islam (TPI) dan Taman Siswa Islam (TSI) yang masih diasuh langsung oleh Mustofa Bisri. Kedua pondok ini menjadi central di wilayah Rembang kota. Menurut salah satu santri Rembang, Pak Kiai di pondoknya memiliki kedekatan dengan keluarga Gus Mus, sehingga tidak menuntut kemungkinan dirinya sebagai santri di Lasem juga sering *sowan* ke pondok milik Gus Mus tersebut. Meskipun bukan sebagai santri pondok Rauthotut Thalibin. Hal ini membuktikan bahwa pondok milik Gus Mus memiliki relasi dengan pondok-pondok lainnya di sekitar Rembang kota. Dan inilah yang menjadi dasar kekutan PKB di Rembang.

Lokasinya yang strategis di tengah kota membuat PKB melebarkan wilayah kekuasaannya di Rembang.

Hal yang sama terjadi juga di Sarang dan Lasem. Di Sarang, Kiai Maimoen Zubair memiliki pondok pesantren yang sangat terkenal dengan nama Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang. Pondok ini memiliki santri sekitar 3000 di pondok tersebut dengan jumlah alumni hingga puluhan ribu tersebar di Indonesia. Al-Anwar tidak hanya memiliki pondok pesantren tetapi juga sekolah umum dan universitas bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang. Sekolah ini di pimpin langsung oleh anak Kiai Maimoen bernama Abdul Ghofur atau biasa dikenal Gus Ghofur. Dosen pengajar sekolah ini pun beberapa masih keluarga Kiai Maimoen, salah satunya anak menantunya –istri Gus Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah—Ning Nawal yang juga menjadi Bu Nyai dari Pondok Putri Al-Anwar. Bukan hanya itu, Kiai Abdul Rohim Alm. ponakan dari Kiai Maimoen juga mendirikan pondok di Sarang yang di kenal dengan Pondok Mus. Serta ada juga madrasah atau sekolah umum yang menjadi jaringan Kiai Maimoen dikenal dengan sebutan MGS (Madrasah Ghozaliyah Syai'fiah). Menurut Samsul Huda, wakil sekretaris DPC PPP Rembang, madrasah ini merupakan salah satu sekolah yang menyatukan pondok-pondok di Sarang, karena para santri bisa mengenyam pendidikan umumnya di MGS ini. Ia mengatakan :

“Disitu ada satu madrasah namanya MGS (Madrasah Ghozaliyah Syai'fiah), disitu Madrasah itu yang menyatukan semua pondok-pondok yang ada di Sarang. Itu banyak dari pondok yang terkecil, santrinya sedikit itu muaranya di MGS.”

Jaringan yang besar inilah yang membuat Sarang menjadi sangat kuat. Meskipun para santri tidak begitu paham betul apa itu politik, tetapi ini yang mampu mempengaruhi para santri beserta orang tuanya untuk menjadi pendukung PPP. Menurut Samsul juga ketika wawancara, di Sarang ini memiliki banyak pondok dan banyak kiai, tapi terhimpun dalam satu kesatuan yang di sebut Santri Sarang. Dan Sarang ini *central* dari seluruh pondok dan sekolah yang ada yaitu Kiai Maimoen. Maka tidaklah heran jika PPP masih mampu bersaing dengan PKB. Karena kubu Kiai Maimoen di Sarang yang sangat kuat, sehingga sampai detik ini PKB juga belum mampu menguasai Sarang.

Kekuatan dari Kiai Maimoen tidak hanya berada di Sarang, tetapi juga di perkuat dari keluarga Kiai Thoyfoer yang ada di Lasem. Berawal dari Pondok Al-Hamidiyah Lasem, Alm. Kiai Thoyfoer melebarkan sayap pendidikan islam bersama dengan madrasah Avicenna. Sepeninggalannya, sekolah ini di asuh oleh anaknya Gus Luthfi Thomafi. Pengaruh dari keluarga ini di Lasem tak kalah kuatnya dengan Kiai Maimoen di Rembang meskipun sosok Kiai Thoyfoer sudah meninggal. Hal ini di sebabkan salah satunya Kiai Thoyfoer yang masih merupakan keluarga atau kerabat dari Kiai Ma'sum yang sangat terkeal di Rembang. Kiai Ma'sum juga memiliki Pondok yang sudah sangat lama berdiri yaitu Pondok Pesantren Al-Hidayat. Kedekatan Gus Aang dengan turunan dari Kiai Ma'sum di buktikan ketika perayaan satu abad berdirinya pondok ini, Gus Aang-lah salah satu orang yang meresmikannya mewakili dari pondok tersebut. Strateginya membangun relasi dengan santri juga di buktikan dengan kedekatannya dengan para santri Al-Hidayat melalui dukungan kegiatan yang

akan dilakukan oleh santri.⁹ Hal ini berdampak pada popularitas Gus Aang di kalangan para santri. Oleh karena itu, pondok Kiai Ma'sum yang sudah berumur hingga 1 abad ini menjadi salah satu kekuatan dari Gus Aang –Arwani Thomafi putra Kiai Thoyfoer—untuk tetap mempertahankan posisi PPP di Lasem. Ia bersama dengan Kiai Maimoen yang menjadi tonggak keamanan wilayah PPP di Sarang dan Lasem. Maka tidak heran, bahwa Gus Aang sangat dekat sekali dengan Kiai Maimoen selayaknya anak sendiri.

Berasal dari kekuatan yang tergambar dari dua kubu tersebut, tidaklah heran jika Kabupaten Rembang terpecah menjadi dua kubu. Bahkan penyebutan untuk wilayah memiliki namanya masing-masing. Kita tidak bisa menggambarkan “Rembang” sebagai wilayah yang di dalamnya ada Sarang, Lasem, Leteh, Pamotan dll. Tapi “Rembang” identik untuk penyebutan wilayah Rembang kota, Leteh dan sekitarnya yang mana menjadi kekuasaan dari keluarga Gus Mus. Sedangkan untuk wilayah kekuasaan Kiai Maimoen disebut “Sarang” yang mana seolah-olah tidak menjadi bagian dari Rembang itu sendiri. Begitu pula yang terjadi dengan “Lasem”, yang memiliki nomenklatur tersendiri yang menjadi penyokong dari “Sarang”. Hal inilah yang biasa dilakukan oleh masyarakat kabupaten Rembang dalam menyebutkan nomenklatur kabupaten Rembang di dalamnya terdapat dua wilayah yaitu “Rembang” dan “Sarang”.

Perbandingan kekuatan pengaruh dari kedua kubu tersebut tentu menjadi kekuatan milik Kiai Maimoen Zubair. Sebab, kekuatan yang di bangun oleh Kiai Cholil di Leteh tidak cukup berhasil, dan justru sedikit membuat pondok

⁹ Penulis mengalami dan mengamati secara langsung ketika mengikuti perjalanan dinas Gus Aang.

pesantren di “Rembang” Leteh cukup apatis. Dampaknya tidak ada kiai atau keturunan kiai di pondok-pondok Leteh yang mau terjun ke politik praktis. Sedangkan dari sisi Kiai Maimoen tetap bersemangat mempertahankan pengaruhnya yang di turunkan kepada anak-anaknya. Pengaruh KH. Maimoen-lah yang menyelamatkan suara PPP tetap kuat di Sarang Kabupaten Rembang. Disini terlihat bagaimana oligarki yang dibangun Kiai Maimoen di Rembang menjadi yang paling kuat dan belum bisa ada yang menandingi kekuatan KH. Maimoen. Maka wajar saja jika ia menjadi banyak rujukan para politisi untuk meminta dukungan dan doa restu. Hal ini dikarenakan kekuatan suara KH. Maimoen masih sangat berpengaruh meskipun bukan berasal dari dirinya langsung tetapi dari orang-orang yang ada di bawahnya.

2.3.3. KH. Maimoen Zubair sebagai Sentral

KH. Achmad Thoyfoer berpihak kepada Kiai Maimoen untuk bertahan di PPP menjadikan Kiai Maimoen sebagai sentral di Sarang dan Lasem. KH. Thoyfoer yang menjadi sentral di Lasem ternyata meninggal di tahun 2007 sehingga pengaruhnya juga beralih ke KH. Maimoen Zubair. Kemudian anak-anak KH. Thoyfoer yang melanjutkan ke jenjang politik dengan sepeninggalannya menjadi “murid politik” dari KH. Maimoen Zubair. Posisi Kiai Maimoen sebagai sentral tidak hanya membuat Kiai Maimoen sebagai sentral di Rembang, tetapi juga di PPP dan jajaran Kiai NU di Indonesia, karena ia adalah kiai yang paling *disepuh*-kan atau dituakan. Ia bahkan disebutkan oleh Taj Yasin putranya telah dijadikan sebagai tokoh nasional. Dalam wawancaranya Gus Yasin mengatakan :

“Nggak perlu cuma rembang Mbak, seluruh Indonesia itu mengacungi jempol, bahkan partai-partai yang ada di Indonesia sekarang ini, mereka

memposisikan Kiai Maimoen ini adalah sebagai tokoh nasional sekarang yang bisa dimintain fatwanya atau petunjuknya atau nasihatnya beliau.”

Sebagai sentral di Rembang, seluruh masyarakat Rembang mengenalnya dan ikut terlibat berbagai kegiatan yang ia buat untuk masyarakat. Bagaimanapun juga untuk menjadi seorang sentral, Kiai Maimoen memiliki strategi dakwah tersendiri agar dirinya memiliki *power* untuk mempengaruhi masyarakat. Strategi-strategi dakwah inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor bagaimana Kiai Maimoen mampu menjadi sentral di usianya yang sudah sangat *sepuh* 98 tahun.

Hal pertama yang dipikirkan oleh Kiai Maimoen adalah strategi dakwah untuk mengubah pola kehidupan dan membangun akhlak masyarakat Rembang. Ia memiliki cara berkomunikasi dengan melakukan kegiatan ceramah atau pengajian tentang keagamaan dan keilmuan. Ilmu-ilmu agama yang ajarkan ini mampu merubah akhlaq masyarakat dalam kehidupan keberagaman sehari-hari. Mereka menjadi masyarakat yang sangat santun, sopan dan ramah. Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan masyarakat dipenuhi dengan aktivitas keagamaan yang mana bukan hanya sekedar pengajian ceramah, tetapi ibadah solat berjamaah, mengaji, berpuasa dsb. Bahkan karna bentuk ceramahnya juga menggunakan bahasa *jowo kromo inggil*, bahasa ini menjadi bahasa komunikasi utama masyarakat Rembang. Meskipun ini menjadi bahasa utama suku Jawa, tapi di Rembang tidak seperti daerah lain yang hampir mengikis penggunaan *jowo kromo inggilnya*, tetapi lebih banyak menggunakan bahasa *jowo ngoko* atau Bahasa Indonesia. Meskipun penggunaan *jowo kromo* ini bukan dilatarbelakangi oleh Kiai Maimoen, tetapi demi menjaga akhlaq, kesopanan dan kehalusan orang Jawa, mereka terus melakukan itu. Hal ini juga menjadi salah satu ajaran utama para

santri Sarang di pondoknya. Selain dari ajaran keagamaan, ia juga memberikan ceramah tentang wawasan keilmuan yang membuat masyarakat yang mendengar menjadi bertaKiai ilmunya. Melalui ceramah ini masyarakat yang notabene memiliki standar pendidikan rendah bisa teredukasi dengan ceramah yang ia sampaikan. Dan ini terbukti efektif dapat memajukan masyarakat pedesaan dengan melihat bagaimana perkembangan kehidupan mereka sehari-hari dan bobot pertanyaan yang selalu di ajukan oleh masyarakat saat mendengarkan ceramah. Disamping itu yang menghadiri aktivitas pengajian Kiai Maimoen semakin hari jama'ahnya terus bertaKiai dan yang antusias terus mengikuti juga banyak.

Bukan hanya ceramah, ia juga mengembangkan sarana pendidikan untuk wilayah Sarang. Pada sub bab dua kubu sebelumnya telah di jelaskan sebagian pendidikan apa saja yang telah Kiai Maimoen bangun. Selain pondok pesantren, ia juga membangun madrasah yang bisa mengakomodasikan pendidikan masyarakat dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang menjadi bukti sejarah bagaimana Kiai Maimoen membangun pendidikan di Rembang untuk memberantas kebodohan masyarakat Rembang. Pondok ini berawal dari musholla kecil berkembang hingga menjadi pondok yang menampung 3000 santri. Bukan hanya pondok pesantren tetapi Kiai Maimoen juga membangun Tanfidzil Qur'an di kediaman putranya Gus Najih. Para santri pondok di sana diwajibkan untuk mengenyam pendidikan di MGS dan Mukodharoh (MKD) yang mana saat ini MGS tersebut menjadi madrasah yang mendidik seluruh santri Sarang. Pondok Al-Anwar sendiri juga mengembangkan beberapa jenjang pendidikan seperti Taman Pendidikan Al-

Qur'an (TPA), Madrasah Al-Wustho' dan Al-Ulya, Pengajian Majelis Ta'lim, dan pembangunan MTs dan MA Ma'arif yang di bantu juga oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

Kiai Maimoen juga turut aktif melakukan kegiatan bakti sosial dan pengembangan kebudayaan. Kegiatan bakti sosial yang aktif ia lakukan yaitu santunan anak yatim dan fakir miskin. Kiai Maimoen mengajak masyarakat untuk aktif melakukan kegiatan santunan untuk menumbuhkan rasa loyalitas antarwarga Sarang. Kegiatan ini dilakukan dengan berkeliling mengunjungi panti asuhan dan fakir miskin dengan memberikan bantuan kepada mereka. Ia juga aktif menggerakkan masyarakat untuk melakukan kerja bakti setiap hari Jum'at hingga masuk ke kampung-kampung warga. Kegiatan ini rutin dilakukan hingga semasa tuanya, bakti sosial ini menjadi salah satu kebiasaan masyarakat Sarang. Dalam bidang kebudayaan, Kiai Maimoen mengembangkan rebana dan drumband. Rebana ini di tampilkan saat hari-hari besar islam, perayaan wisuda santri, dsb. yang bertujuan agar kebudayaan islam tidak luntur di era perkembangan musik modern sekarang. Rebana melantunkan sholawat Nabi dengan diiringi alat musik rebana dan 7 orang vokalis. Drumband juga menjadi salah satu seni yang di kembangkan Kiai Maimoen, grup drumband Al-Anwar ini sering mengikuti kegiatan- kegiatan kecamatan Al-Anwar dalam peringatan hari besar nasional, dan kunjungan pejabat tinggi negara di Pondok Al-Anwar. Kebudayaan ini menarik simpati masyarakat setempat untuk menyaksikan dan akhirnya terlibat dalam kegiatan sosial yang dilakukan Kiai Maimoen.

Strategi dakwah KH. Maimoen Zubair tersebut terus dilakukan dan diistiqomahkan, sehingga dirinya mampu mengumpulkan masyarakat dan

terpengaruh oleh apa yang ia gagas. Seluruh kegiatan ini pada akhirnya mampu menyebar ke seluruh wilayah Rembang yang tentunya dengan bantuan dari banyak pondok pesantren di Rembang yang mengikutinya. Dari sinilah akhirnya Kiai Maimoen memiliki jama'ah yang jumlahnya ribuan dan mampu membuat mereka mengikuti seluruh arahan yang Kiai Maimoen sampaikan. Hingga pada akhirnya ia menjadi pusat dari seluruh masyarakat Rembang. Hal ini yang pada akhirnya membawanya menjadi sentral di dalam partai dan kegiatan politik karena mampu mempengaruhi masyarakat. Dari sinilah para politisi kerap mengunjungi Kiai Maimoen untuk *sowan* meminta dukungan dari jama'ahnya dan memohon doa restu. Jika politisi tersebut di terima dan di dukung oleh Kiai Maimoen dan menyampaikan dukungannya kepada jama'ahnya maka pada saat itu juga para jama'ah yang jumlahnya ribuan tersebut akan mengikuti pilihan Kiai Maimoen. Masyarakat menyebutnya dengan "*Kulo nderek dawuhe Kiai*" yang artinya saya ikut saran dari Kiai. Hal ini pula yang terjadi di tahun politik saat ini, pemilu 2019 yang cukup membawa perpecahan antara Jokowi dan Prabowo. Di saat pemilu seperti inilah pengaruh Kiai Maimoen di masyarakat menjadi bukti yang kuat bahwa "*Kulo nderek dawuhe Kiai*" bukan kalimat belaka.

Posisinya sebagai sentral bukan hanya di kalangan masyarakat Rembang, tetapi dalam internal partai PPP mulai dari DPC hingga DPP. Beberapa kasus internal yang terjadi tidak luput dari pengaruhnya untuk menemukan solusinya. Kiai Maimoen hanya perlu mengeluarkan fatwa dan permasalahan itu akan selesai, meski hasilnya terkadang hasilnya bisa diluar dugaan yang diharapkan, tetapi Kiai Maimoen menjadi tonggak untuk menemukan solusi bagi PPP. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kasus dua kubu di tubuh DPP antara Djan

Faridz dan Gus Romy. Mereka berselisih berawal dari Ketum PPP terdahulu Suryadharma Ali (SDA) yang secara tiba-tiba menyatakan diri bergabung dengan kubu Prabowo saat pemilu. Padahal seluruh internal partai dan SDA sebagai ketum belum mengadakan rapat konsolidasi partai. Oleh karena itu, pengurus DPP beranggapan Ketua Umum Suryadharma Ali mengambil keputusan secara sepihak. Namun belum selesai permasalahan itu, SDA terjerat kasus korupsi dan di penjara, kemudian perjuangan yang dilakukannya untuk mendukung Prabowo di lanjutka oleh Djan Faridz yang mana akhirnya bersiteru dengan Gus Romy sampai saat ini.

Permasalahan memuncak saat mereka mengadakan Rapat Besar Pengurus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kondisi dalam ruangan ternyata sudah terbelah menjadi dua kubu memanjang. Masing-masing pengurus bisa memilih untuk berada disisi dan kubu sebelah mana. Apakah di belakang Djan Faridz atau Gus Romy. Pada saat itu putra-putra Kiai Maimoen berada di sisi Djan Faridz, namun Kiai Maimoen ternyata memiliki pandangan yang berbeda. Ia justru mempercayakan pilihannya kepada Gus Aang putra Kiai Thoyfoer. Seketika di ruangan, Gus Aang tidak menunjukkan dimana dia akan berpihak. Ia justru duduk di tengah-tengah antara dua kubu yang membuat suasana sedikit tidak nyaman. Hal ini di sebabkan Gus Aang membawa pesan yang diamanahkan oleh Kiai Maimoen. Menurut orang-orang yang ada di dalamnya, Kiai Maimoen hanya berkata "*Pilihanku ono ning Aang, Aang milih sing ndi yo kuwi sing aku pilih*".¹⁰ Melihat hal tersebut menandakan pastinya sudah ada arahan tersendiri dari Kiai Maimoen melalui Gus Aang, hingga akhirnya Gus Aang mengutarakan di

¹⁰ Hasil wawancara dengan pengurus wilayah yang mengikuti rapat besar di Jakarta.

hadapan publik dan memihak pada Gus Romy. Itu artinya Kiai Maimoen juga memihak Gus Romy. Beberapa dari pengurus wilayah juga sudah menduga bahwasannya sejak awal Kiai Maimoen berada di pihak Gus Romy. Oleh karena itu sampai saat inilah PPP yang resmi dan akhirnya di sahkan oleh Kementerian Agama adalah PPP dari kubu Gus Romy.

Pihak Djan Faridz yang kalah akhirnya menarik diri dari kepengurusan tersebut dan membentuk sendiri PPP versi Djan Faridz. Dirinya membuat muktamar dengan para pengikutnya untuk legal standingnya sebagai partai. Hal yang kemudian terjadi adalah PPP memiliki dua kepengurusan. Memiliki dua DPP, dua DPW dan DPC terbelah ada yang memihak Djan Faridz tetapi juga ada yang memihak Gus Romy. Kondisi terpecah dua kubu ini semakin panas menjelang pemilu 2019. Hal ini disebabkan Djan Faridz yang digantikan dengan Sekretarisnya mendeklarasikan bahwa PPP berada di kubu Prabowo, sedangkan Gus Romy berada di kubu Jokowi. PPP versi Gus Romy melaporkan PPP versi Djan Faridz ke jalur hukum karena memproklamirkan dengan menggunakan lambang partai, nama partai yang mereka anggap tidak sah dan melanggar hukum. Karena PPP dari kubu Gus Romy-lah yang sah dan resmi di akui oleh negara, sehingga pihak Gus Romy merasa keberatan jika kubu Djan Faridz mendeklarasikan koalisi dengan menggunakan lambang dan nama PPP.

Putra dari Kiai Maimoen yang menjadi pengurus partai beberapa beralih ke kubu Gus Romy dan ada satu yang menetap di kubu Djan Faridz. Gus Yasin menjadi salah satu orang yang mendengarkan *Abahnya* dengan mengikuti kubu Gus Romy, dan Gus Wafi yang masih teguh berada di kubu Djan Faridz. Gus Wafi menjadi Ketua DPW PPP Jawa Tengah versi Djan Faridz menandingi

Masruhan Samsurie Ketua DPW PPP Jawa Tengah versi Gus Romy. Namun menurut salah satu pengurus DPW PPP mengatakan bahwa :

“pengurus DPW PPP sekarang itu jumlahnya sangat banyak. Karena Pak Masruhan sebagai Ketua mencoba menggandeng orang-orang dari kubu Djan Faridz untuk masuk dalam struktural DPW PPP. Meskipun tidak semuanya bisa dan tetap ada PPP versi Djan Faridz, tapi kita berupaya supaya PPP Jateng tidak pecah.”¹¹

Tentu saja perpecahan menjadi kedua tubuh PPP tersebut berpotensi kehancuran internal PPP. Agar hal tersebut tidak terjadi, tentunya PPP dari kubu Gus Romy terus berusaha menyatukan kembali PPP dari Kubu Djan Faridz. Karna jika PPP Jateng sampai terpecah, maka potensi suara yang di peroleh PPP juga akan semakin berkurang. Mengingat Jawa Tengah masih menjadi salah satu basis dari suara PPP.

Peran Kiai Maimoen menjadi sangat menentukan pada masa genting seperti ini. Dimana ada kedua kubu yang bersiteru dan hanya salah satu yang mendapatkan pengakuan oleh negara. Maka, semestinya hanya dengan mengeluarkan fatwa kepada kubu Djan Faridz untuk bergabung kembali dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan akan tercipta suasana damai kembali. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kiai Maimoen mulai terlihat anaknya Gus Wafi yang berada di kubu Djan Faridz dan sempat bersiteru dengan Gus Yasin¹², pada akhirnya juga legowo mendukung Gus Yasin sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah.

¹¹ Hasil wawancara dengan pengurus DPW pada bulan Oktober di Semarang.

¹² Menurut salah satu informan internal tim pemenangan Ganjar Yasin.

Permasalahan yang sempat terjadi antara Gus Wafi dengan Gus Yasin saat itu adalah kesamaan tawaran sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah dari Calon Gubernur Jawa Tengah yang berbeda. Sebelum Gus Yasin menerima tawaran dari Ganjar Pranowo sebagai calon wakil gubernurnya, ternyata Gus Wafi mendapatkan tawaran sebagai calon wakil gubernur dari Sudirman Said yang mencalonkan diri melawan Ganjar Pranowo. Gus Yasin sebagai adiknya yang menyetujui dan melanjutkan untuk maju, membuat Gus Wafi kecewa dan tetap bertahan berada di kubu Djan Faridz dan Sudirman Said pada saat pemilu maupun pilkada. Pencalonan Gus Yasin sebagai calon wakil gubernur tersebut tentunya juga bukan semata-mata ambisi pribadi, tetapi juga atas restu dan dorongan yang di berikan oleh Kiai Maimoen sendiri. Oleh karena itu, jelaslah bahwa posisi Kiai Maimoen sebagai sentral di PPP. Sikapnya menggambarkan bagaimana arah partai bergerak, bukan hanya di masyarakat tetapi juga sebagai bentuk sikap politik partai. Dengan sikapnya yang memihak ke Gus Romy, artinya Kiai Maimoen juga memihak kepada Jokowi dari pada Prabowo. Hal ini di sebabkan permasalahan yang muncul di awal karena Suryadharma Ali memihak kubu Prabowo untuk pemilu 2019, dan ini tidak mendapatkan restu dari Kiai Maimoen dengan menunjukkan sikap keberpihakan kepada Gus Romy. Hingga pada akhirnya ini berujung pada pencalonan Gubernur Jawa Tengah dengan memilih Ganjar Pranowo maju kembali di dampingi oleh anaknya Gus Yasin.

Begitulah sosok Kiai Maimoen yang menjadi sentral dari politik PPP dan nasional. Kharisma yang begitu kuat membuat dirinya menjadi sosok yang sangat didengarkan pendapatnya dan tidak ada seorangpun yang bisa menolak atau membantah nasihatnya. Kehebatan Kiai Maimoen yang di usia senja masih

mampu berfikir hal-hal untuk kemajuan partai dan negara yang mana sangat jarang ada orang yang masih mampu berfikir jernih di usia lebih dari 90 tahun.